

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan diri seseorang dalam rangka menyiapkan peranannya di masa mendatang yang dibekali oleh ilmu pengetahuan, keterampilan serta sikap atau adab yang baik. Pada hakikatnya semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama merata. Seperti halnya yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Adapun juga dalam UU No.20 Tahun 2003 Pasal 5 disebutkan ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan ayat (5) setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.¹

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan di Indonesia memiliki tujuan nasional yang mengacu pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang menggambarkan bahwa Indonesia memiliki cita-cita untuk memberikan pendidikan yang sama rata ke seluruh penjurunya agar dapat tercapai kehidupan bangsa yang cerdas. Sejatinya, pendidikan merupakan suatu alat maupun aset yang sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Suatu negara tidak akan maju apabila sumber daya manusianya tidak memiliki pendidikan yang berkualitas. Berbagai komponen dimiliki oleh negara demi tercapainya kemajuan maupun cita-citanya, salah satunya adalah lembaga negara yang turut hadir dalam kemajuan bangsa ini. Tentunya lembaga pemerintahan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas didalamnya. Hal tersebut sudah pasti bahwa sumber daya manusia yang berkualitas sejalan dengan pendidikan seperti apa yang ditempuhnya.

¹Kemdikbud, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/UU_tahun2003_nomor020.pdf). Diunduh tanggal 10 Desember 2022.

Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas sangat berperan penting bagi suatu lembaga terutama lembaga pemerintahan karena dapat menunjang terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas pula sebagai salah satu unsur untuk mencapai kemajuan dari lembaga tersebut.

Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga tertinggi didalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memegang peranan kekuasaan kehakiman. Telah disebutkan bahwa demi kemajuan suatu lembaga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, begitu juga halnya dengan Mahkamah Agung RI. Setiap sumber daya manusia yang terdapat di Mahkamah Agung RI tentunya membutuhkan pendidikan serta pengembangan yang berkualitas untuk tercapainya kemajuan serta cita-cita dari lembaga tersebut di masa mendatang. Dalam halnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, Mahkamah Agung RI telah berupaya dengan mendirikan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan yang didalamnya terdapat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis serta Manajemen dan Kepemimpinan.

Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (pusdiklat menpim) terdapat berbagai program pelatihan yang tentu menunjang perkembangan sumber daya manusia baik *hardskill* maupun *softskill* dalam lingkup lembaga yang berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung RI. Adapun pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan pada tahun 2022 antara lain:

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
2. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
3. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
4. Pelatihan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik
5. Pelatihan Penyelenggaraan Manajemen Barang Milik Negara
6. Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif
7. Pelatihan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
8. Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja

9. Pelatihan Mempersiapkan Generasi Emas 2045 Mahkamah Agung RI

10. Pelatihan Persiapan Seleksi Beasiswa Luar Negeri

Program pendidikan dan pelatihan (diklat) tersebut dibuat untuk meningkatkan kompetensi serta *hardskill* maupun *softskill* dari seluruh sumber daya manusia yang termasuk dalam lembaga dibawah naungan Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan diklat selaras dengan pendidikan sepanjang hayat dan juga termasuk salah satu jenis dari pendidikan nonformal yang berperan sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 26. Diantara program diklat yang telah disebutkan terdapat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah suatu program pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada kompetensi kepemimpinan terkait dengan pelayanan publik dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan seorang pengawas dengan sasaran pesertanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) jenjang eselon IV. Terdapat berbagai agenda dalam PKP, salah satunya adalah agenda kepemimpinan pelayanan dengan berbagai mata pelatihan. Diagnosis organisasi menjadi salah satu mata pelatihan dalam agenda kepemimpinan pelayanan.²

Materi diagnosis organisasi memiliki tujuan pembelajaran, yaitu mampu menentukan isu strategis sesuai unit organisasinya sebagai bentuk dari gagasan perubahan, pemahaman konsep diagnosa organisasi serta teknik-teknik analisis manajemen untuk mendukung pelaksanaan setiap tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh para pelaksana di bawahnya. Karakteristik dari pelatihan ini tentunya mengacu pada tujuan yang ingin dicapai serta peserta pelatihannya.

²Ni Ketut Riani. Integrasi Kompetensi Dalam Pelatihan Kepemimpinan. Jurnal Inovasi Penelitian. Juni 2021, Volume 2, hal 17-26..

Pada setiap diklat yang dilaksanakan, terutama yang memang mengambil widyaiswara internal dari pusdiklat memimpin tentunya melakukan pembuatan berbagai media pembelajaran yang diberikan kepada peserta pelatihan. Terlebih semenjak pandemi Covid-19 melanda, media pembelajaran dalam dunia diklat berkembang dengan sangat pesat. Biasanya, para widyaiswara menggunakan media pembelajaran seperti modul, video, studi kasus, serta kuis kepada peserta diklat. Media pembelajaran tersebut tentunya memuat materi-materi yang akan disampaikan.

Terutama dalam hal pembuatan modul. Modul yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk peserta pelatihan terkesan masih sangat konvensional karena modul tersebut masih berupa materi secara utuh dalam bentuk Microsoft Word.

Mata pelatihan diagnosis organisasi mendapatkan alokasi waktu sebanyak 18 jam pelajaran. Dengan kondisi tersebut, tentunya riskan membuat peserta pelatihan menjadi jenuh serta tidak fokus apabila metode dan media pembelajaran yang digunakan tidak tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan inovasi atau kreasi dari media pembelajaran untuk mencegah kekhawatiran tersebut. Pengembangan modul yang menarik, interaktif dan inovatif tentunya sangat diperlukan, terlebih pada zaman sekarang dimana semua hal diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi *digital*.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemunculan *trend* digital di dunia, modul harus dikembangkan menjadi lebih modern lagi agar dapat mengikuti perkembangan dunia dan tidak terkesan ketinggalan zaman. Hal tersebut menjadikan modul elektronik interaktif sebagai bentuk pengembangan yang cocok untuk dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam lingkup diklat. Modul elektronik interaktif merupakan suatu bahan pembelajaran yang berisikan materi, metode, batasan-batasan, serta cara mengevaluasi yang dirancang dengan terstruktur dan menarik sehingga diharapkan dapat mencapai kompetensi maupun subkompetensi

materi atau mata diklat sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.³ Modul elektronik interaktif yang akan dirancang, didalamnya akan memuat banyak sekali komponen antara lain rangkuman materi, video pembelajaran, kuis refleksi, latihan soal secara keseluruhan, dan QR Code yang berisikan biodata dari widyaiswara yang membimbing dalam pembelajaran pada diklat yang dilaksanakan.

Kegunaan dari modul elektronik interaktif adalah sebagai salah satu sumber belajar baru bagi peserta didik seperti halnya dipenelitian ini, peserta didik yang dimaksud adalah peserta yang mengikuti diklat serta modul elektronik ini dapat mengurangi penggunaan kertas dalam proses pembelajarannya.⁴ Lebih spesifiknya, keunggulan lain dari modul elektronik interaktif ini tentu sangat banyak diantaranya :

1. Tidak adanya batasan ruang dan waktu untuk menggunakannya
2. Meningkatkan kemandirian serta pola berpikir kritis bagi peserta diklat
3. Meningkatkan motivasi belajar peserta diklat karena konten-konten yang termuat didalamnya disajikan secara menarik sehingga peserta pelatihan dapat memahami materi dengan mudah
4. Memberdayakan atau meningkatkan minat peserta diklat terhadap literasi digital yang saat ini sedang marak berkembang.⁵

Dalam penggunaannya, e-modul interaktif berperan sebagai media pembelajaran yang berupaya untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat dalam memperkaya sumber informasi. Pemanfaatan dari teknologi yang terdapat dalam modul elektronik menciptakan suatu kepraktisan pada penggunaannya yang dapat dimanfaatkan dimanapun dan kapanpun. Modul elektronik ini juga memiliki sifat interaktif dalam penyajian informasi yang

³Nurulita Imansari, Ina Sunaryantiningsih. Pengaruh Penggunaan E-Modul Interaktif Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Materi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro. April 2017, Volume 2, Nomor 1, hal 11-16.

⁴*Ibid.*

⁵Fatika Wulandari, Relsas Yogica dan Rahmawati Darussyamsu. Analisis Manfaat Penggunaan E-Modul Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Khazanah Pendidikan. September 2021, Volume 15, Nomor 2, hal 139-144.

merupakan suatu penggabungan berbagai multimedia interaktif untuk menciptakan informasi yang sistematis dan menarik.⁶

Berdasarkan penjabaran dari analisis masalah tersebut, diperlukan pengembangan modul elektronik interaktif materi diagnosis organisasi pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI dengan tujuan sebagai inovasi baru bagi media pembelajaran program pelatihan yang ada di Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI. Pengembangan modul dilakukan melalui kegiatan penelitian *Research and Development* dengan judul “Pengembangan Modul Elektronik Interaktif Materi Diagnosis Organisasi Pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis masalah yang telah diuraikan, maka diidentifikasi bahwa permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain :

1. Media pembelajaran dalam program pelatihan di Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI membutuhkan inovasi baru yang dapat beriringan dengan perkembangan zaman dalam aspek digitalisasi.
2. Karakteristik peserta diklat yang termasuk dalam kategori orang dewasa dengan rentang usia 32 sampai 40 tahun membutuhkan media pembelajaran yang tidak monoton agar tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan analisis serta identifikasi masalah yang telah diuraikan dapat ditemukan bahwa masalah dalam penelitian ini difokuskan pada “Pengembangan Modul Elektronik Interaktif Materi Diagnosis Organisasi Pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI”.

⁶Isti Qotimah, Dadi Mulyadi. Kriteria Pengembangan E-Modul Interaktif dalam Pembelajaran Jarak Jauh. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*. 2021, Volume 4, Nomor 2, hal 125-131.

D. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengembangan modul elektronik interaktif dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan layak digunakan dalam materi diagnosis organisasi pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI?”.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa hasilnya dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran berupa modul elektronik interaktif sebagai bentuk pengenalan kebermanfaatan digitalisasi terhadap widyaiswara.

2. Bagi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI

Memanfaatkan produk yang dihasilkan berupa modul elektronik interaktif sebagai media pembelajaran dalam pelatihan yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan semangat peserta pelatihan dalam mengikuti serta memahami pembelajaran yang diberikan.

3. Bagi Program Studi Pendidikan Masyarakat

Dapat menjadi referensi dalam pengoptimalan media pembelajaran yang berbasis teknologi digital yang inovatif, interaktif, efektif, dan kreatif untuk pengembangan modul khususnya di lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Selain itu, produk yang dihasilkan juga dapat ditandai sebagai HKI

(Hak Kekayaan Intelektual) sehingga dapat menunjang eksistensi Prodi Pendidikan Masyarakat diberbagai lembaga.

